



Company Profile

GUGUM RIDHO & PARTNERS



THE FIRM

GUGUM RIDHO & PARTNERS is Law Firm based in Indonesia with years of experience on handling legal issues on multy legal aspects. Originated by the name of our Founder, Mr. Gugum Ridho Putra has excellent footprints on handling major constitutional and adminstrative law cases in Indonesia. His biggest concern is to help Clients fully realize the urgency to handle public law issues in correct way. While private/commercial law disputes cost only money (financial), but public law disputes (such as state policy or regulation that hinder business or revocation of business permitt), will threatened business sustainability and the cost will be infinite. We are now growing to legal services that has direct effects to Client's personal or business life on private/commercial area too. Multy legal aspects that we serve both on litigation and nonlitigation assistance making Us more complete than others.

FIRMA KAMI

GUGUM RIDHO & PARTNERS adalah Firma Hukum yang berbasis di Indonesia dengan pengalaman bertahun-tahun menangani masalah hukum multi aspek. Berasal dari nama Pendiri kami, Bapak Gugum Ridho Putra yang memiliki jejak sangat baik dalam menangani kasus-kasus hukum tata negara dan administrasi besar di Indonesia. Perhatian terbesarnya adalah untuk membantu Klien sepenuhnya menyadari urgensi untuk menangani masalah hukum publik dengan cara yang benar. Sengketa hukum privat/komersial lazimnya memunculkan kerugian finansial (keuangan), tetapi sengketa hukum publik (seperti adanya kebijakan atau peraturan yang menghambat usaha atau bahkan keputusan pencabutan izin usaha), akan mengancam kelangsungan usaha Klien dan biaya yang ditimbulkan tidak terbatas. Saat ini Kami berkembang menjadi layanan hukum yang memiliki efek langsung pada kehidupan pribadi ataupun bisnis Klien dalam hukum privat dan komersial juga. Berbagai aspek hukum yang kami layani baik dalam pendampingan litigasi maupun nonlitigasi menjadikan Kiprah Kami lebih lengkap dari yang lain.

OUR TEAM



Gugum Ridho Putra

Managing Partner

About

Mr. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., (Mr. Gugum) holds both Bachelor and Master Degree on Constitutional Law from Universitas Indonesia. Having years of experiences as Legal Researcher and Activist, he Later joined IHZA & IHZA Lawfirm founded by well known National Figure, Mr. Yusril Ihza Mahendra. Thriving for five years leading Constitutional and Administrative law disputes for the firm, until he founded his own in 2018. Mr. Gugum has excellent footprints on handling major constitutional and administrative law cases in Indonesia. He hold dozens of judicial review cases, the procedural and result disputes of national and local elections, until the disputes on administrative court. One of his highest achievement was assisting Mr. Jokowi and Ma'ruf Amin on 2019's presidential election disputes on Constitutional Court of Republic of Indonesia.

Speciality

- Constitutional Law
- Administrative Law

Practice Area

- Electoral Disputes
- Judicial Review
- Administrative Lawsuit
- Industrial Relation Disputes
- General Financial Litigation
- Criminal Litigation

**Dharma Rozali Azhar***Partner*

About

Mr. Dharma has decade of experience on both litigation and corporate practices. He handled Commercial and Financial Services, Liquidation, Bankruptcy Litigation, and Criminal Cases as the extension to those area.

Earning both of his Bachelor (S.H) and Master of Law (M.H) from Universitas Indonesia. Dharma is also member of Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) and Registered Tax Attorney. His bunch of experience colour His Calm and knowledgeable presence in Client's uncertain situation.

He is adept at constantly representing the needs of his clients. He understands the importance of defining a "win" based on business interests and objectives and he knows how to achieve those goals before authorities, administrative bodies, and with opposing parties.

Speciality

- Commercial Litigation
- Corporate Practice

Practice Area

- Commercial Law
- Financial Services & Liquidation
- Bankruptcy Litigation
- Criminal Law
- Industrial Relation/Labor Law
- Tax Law
- Sharia Banking & Financial Services

LITIGATION SERVICES

We provide both litigation and nonlitigation services on both public law area and related issues. Our litigation services provide legal assistances to these followings:

Electoral
Disputes

Judicial Review

Administrative
Law Suite

Finansial/
Commercial
Litigation and
Arbitration

Industrial
Relation
Disputes

Certain Criminal
Litigation

Tax Litigation

Bankruptcy

LAYANAN LITIGASI/PERSIDANGAN

Kami menyediakan layanan litigasi dan nonlitigasi di bidang hukum publik dan isu terkait lainnya. Layanan litigasi/persidangan kami memberikan bantuan hukum untuk hal-hal berikut ini:

Sengketa
Pemilu/Pilkada

Pengujian
Undang-Undang

Gugatan Tata
Usaha Negara

Litigasi Perdata
dan Arbitrase

Perselisihan
Hubungan
Industrial

Kasus Pidana
Tertentu

Litigasi
Perpajakan

Litigasi
Penundaan
Kewajiban
Pembayaran
Utang/Kepailitan

NONLITIGATION SERVICE

Legal
Consultation

Legal Opinion

Lisence and
Regulation
Compliance

Contract
Reviewing and
Drafting

Negotiation and
Mediation

LAYANAN NONLITIGASI/NONPERSIDANGAN

Konsultasi
Hukum

Penyusunan
Pendapat
Hukum

Penelaahan
Perizinan dan
Kepatuhan
Peraturan

Penelaahan dan
Penyusunan
Kontrak

Negosiasi dan
Mediasi

CASE EXPERIENCES/PENGALAMAN KASUS

Sengketa Hasil Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi:

1. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Jambi; (Tahun 2020)
2. Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (Tahun 2019)
3. Sengketa Hasil Pemilu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; (Tahun 2019)
4. Sengketa Hasil Pilkada Kota Makassar; (Tahun 2018)
5. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Sulawesi Barat; (Tahun 2016)
6. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Deli Serdang; (Tahun 2014)
7. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Lampung; (Tahun 2014)
8. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Maluku; (Tahun 2014)
9. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Riau; (Tahun 2014)
10. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Kalimantan; (Tahun 2013)
11. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kediri; (Tahun 2013)
12. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara; (Tahun 2013)
13. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Maluku Utara; (Tahun 2013)
14. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur; (Tahun 2013)

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan (Pencalonan) Pemilu dan Pilkada:

1. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Anggota DPD RI; (Tahun 2018)
2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pilkada Kapuas; (Tahun 2017)
3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pilkada Bireun, Aceh; (Tahun 2016)

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pemilu dan Pilkada:

1. Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pilkada Kota Lampung; (Tahun 2021)
2. Laporan Pelanggaran Administrasi TSM Pilkada Kota Lampung; (Tahun 2020)
3. Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Anggota DPD RI; (Tahun 2019)

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung:

1. Pengujian UU No. 19 Tahun 2003; (Tahun 2020)
2. Pengujian UU No. 10 Tahun 2016; (Tahun 2019)
3. Pengujian UU No. 8 Tahun 1981; (Tahun 2018)
4. Pengujian Permendagri No. 40 Tahun 2016; (Tahun 2018)
5. Pengujian Pergub Provinsi Aceh No. 9 Tahun 2018; (Tahun 2018)
6. Pengujian Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 640 Tahun 1992; (Tahun 2017)
7. Pengujian Perda Kota Depok No. 1 Tahun 2015; (Tahun 2017)
8. Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017; (Tahun 2017)
9. Pengujian PP No. 18 Tahun 2016; (Tahun 2016)
10. Pengujian PP No. 75 Tahun 2015; (Tahun 2016)
11. Pengujian UU No. 41 Tahun 1999; (Tahun 2015)
12. Pengujian UU No. 8 Tahun 2015; (Tahun 2015)
13. Pengujian UU No. 15 Tahun 2006 dan UU No. 15 tahun 2004; (Tahun 2014)
14. Pengujian UU No. 3 Tahun 2005; (Tahun 2014)
15. Pengujian Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011; (Tahun 2014)



CASE EXPERIENCES/PENGALAMAN KASUS

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Sengketa TUN Keputusan Menteri Investasi / BKPM mewakili perusahaan tambang batu bara Kalimantan Timur, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Tahun 2022).
2. Sengketa TUN Keputusan Menteri Investasi / BKPM mewakili perusahaan tambang batu bara Kalimantan Timur, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Tahun 2022).
3. Sengketa TUN Keputusan Menteri Investasi / BKPM mewakili perusahaan tambang batu bara Kalimantan Timur, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Tahun 2022).
4. Sengketa TUN Keputusan Menteri Investasi / BKPM mewakili perusahaan tambang batu bara Kalimantan Timur, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Tahun 2022).
5. Sengketa TUN Keputusan Menteri Investasi / BKPM mewakili perusahaan tambang batu bara Kalimantan Timur, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Tahun 2022).
6. Sengketa TUN Keputusan OJK Tentang Pengendali Utama Bank; (Tahun 2020)
7. Sengketa TUN atas Keputusan Menteri Formula Harga BBM; (Tahun 2019)
8. Sengketa TUN Tumpang Tindih HGU dan IUPHK HTI; (Tahun 2019)
9. Sengketa TUN Pemberhentian PNS Kota Makassar; (Tahun 2019)
10. Sengketa TUN Pemberhentian PNS Kementerian; (Tahun 2019)
11. Sengketa TUN Pencabutan IUP OP Batubara Kalimantan Timur; (Tahun 2018)
12. Sengketa TUN Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan; (Tahun 2017)
13. Sengketa TUN Pemberhentian Wakil Rektor Universitas di Jakarta; (Tahun 2017)
14. Sengketa TUN Pembatalan HGU Perusahaan di Jakarta; (Tahun 2016)
15. Sengketa TUN Pembatalan HGU Perkebunan Sawit di Kalimantan; (Tahun 2016)
16. Sengketa TUN Pengesahan AD/ART Partai Politik; (Tahun 2015)
17. Sengketa TUN Pencabutan Izin Lingkungan Perusahaan; (Tahun 2015)
18. Sengketa TUN Pengesahan AD/ART Yayasan Agama Budha; (Tahun 2015)

CASE EXPERIENCES/PENGALAMAN KASUS

Perkara Pidana Khusus:

1. Perkara Dugaan Penghinaan dan Pelecehan Seksual Game Streaming, Batam Kepulauan Riau (Tahun 2022).
2. Perkara Laporan Tindak Pidana Penggelapan Jakarta Utara (2022).
3. Perkara Laporan Tindak Pidana Laporan Palsu dan Pencemaran Nama Baik Jakarta Utara (2022).
4. Perkara Pencucian Uang Perusahaan Properti Jawa Barat; (Tahun 2020)
5. Perkara Pemerasan Perusahaan Alat Kesehatan Surabaya; (Tahun 2019)
6. Perkara Korupsi Pembangunan Dermaga Jetty Aceh; (Tahun 2017)
7. Penasehat Hukum Anak Usaha BUMN bidang hulu minyak dan gas dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri
8. Penasehat Hukum Anak Usaha BUMN bidang EPC dalam Dugaan Tindak Pidana pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri
9. Penasehat Hukum Lembaga Keuangan BUMN pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri
10. Penasehat Hukum pada berbagai kasus Perusahaan dan Perorangan di Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resort Kota.

Perkara Perdata:

1. Perkara Wanprestasi Jual Beli Gedung mewakili Perusahaan Properti Jakarta, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Tahun 2022).
2. Perkara Wanprestasi Jual Beli Tanah untuk Pembangunan Mall di Kota Depok mewakili Perusahaan Properti di Jakarta (Tahun 2022).
3. Perkara PMH mewakili Perusahaan Walet asal Semarang (Tahun 2022).
4. Perkara Wanprestasi Investasi Keuangan Jakarta; (Tahun 2020)
5. Perkara PMH Pemegang Saham Bank Swasta Nasional; (Tahun 2020)
6. Perkara PMH Perusahaan Telekomunikasi Nasional; (Tahun 2020)
7. Perkara Wanprestasi Sewa-Menyewa Perusahaan Jakarta; (Tahun 2018)

Perkara Ketenagakerjaan:

1. Perselisihan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial Serang mewakili perusahaan di Tangerang, Banten; (Tahun 2022);
2. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial Serang mewakili perusahaan di Tangerang, Banten; (Tahun 2022);
3. Perselisihan Hak di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat mewakili Karyawan di Jakarta ; (Tahun 2022);
4. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat bipartit perusahaan di Jakarta; (Tahun 2019).

CASE EXPERIENCES/PENGALAMAN KASUS

Perkara Arbitrase :

1. Kuasa Hukum Perusahaan Navigasi Pesawat Terbang Tangerang, Banten Beracara di BANI Jakarta (Tahun 2016).
2. Kuasa Hukum BUMN Karya pada perkara Pembatalan Putusan Arbitrase melawan Oil and Gas Company.

Perkara Liquidasi :

1. Tim Likuidasi Perusahaan Asuransi Umum yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Asing

Perkara PKPU :

1. Pemohon PKPU terhadap pengelola Apartemen dibilangan Fatmawati
2. Kuasa Hukum kreditur Lain terhadap perkara PKPU Pemilik Resort di Bali
3. Kuasa Hukum Kreditur Separatis perkara Kepailitan Perusahaan Galangan Kapal



GUGUM RIDHO
&
PARTNERS

18 Office Park Building, MZ Floor, Unit D-3
Jalan TB. Simatupang Nomor 18, Kebagusan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 – Indonesia

Website: www.grplaw.id
E-mail : partner@grplaw.id
Phone: (+62 21) 50112216